

## ABSTRAK

Kasus penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah tidak hanya mengancam asset strategis negara tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan hukum seperti yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PERTAMINA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor Minyak dan Gas Bumi di Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di PT. Pertamina EP Field Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus penyerobotan tanah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi yang intensif kepada Masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus penyerobotan tanah di masa depan.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Penyerobotan Tanah, BUMN Migas

## ABSTRACT

Land encroachment cases are one of the legal issues that frequently occur in Indonesia. Land encroachment not only threatens the state's strategic assets but also leads to social and legal conflicts, as seen in one of the State-Owned Enterprises (BUMN), namely PERTAMINA. This research aims to examine and analyze the forms of resolution for criminal cases of land encroachment involving State-Owned Enterprises (BUMN) in the Oil and Gas sector in Jambi. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Data were collected through field research at PT. Pertamina EP Field Jambi. The results of the study indicate that the resolution of land encroachment cases is carried out through two main approaches, namely litigation and non-litigation. The research concludes that a comprehensive approach is necessary, including strengthening regulations, enhancing inter-institutional coordination, and intensive socialization to the public to prevent and address land encroachment cases in the future.

**Keywords** : Resolution, Land Encroachment, State-Owned Enterprise (BUMN) in Oil and Gas Sector.

